

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU PERTAMA MEI 2012

Awal Mei 2012 ini, akan digambarkan kegiatan DPR dalam akhir Masa Sidang ke III tahun sidang 2011-2012 dan rencana kegiatan untuk masa sidang ke IV.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pada Masa Sidang IV, Komisi dan Badan Legislasi akan melanjutkan pelaksanaan fungsi legislasi, antara lain RUU yang di pastikan akan selesai yaitu: [1] RUU Pendidikan Tinggi. RUU ini belum tuntas selesai pada pembicaraan tingkat I, karena Pemerintah masih meminta waktu untuk berkoordinasi internal dikalangan Pemerintah. Pemerintah memandang RUU ini harus betul-betul menyelaraskan dengan perundang-undangan organik atau peraturan lex-specialist yang telah ada saat ini. Semuanya ini dimaksudkan untuk menata dan mengharmonisasikan pendidikan tinggi ke dalam kesatuan sistem yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, tetapi rujukannya adalah UU Pendidikan Tinggi. Namun demikian, Komisi X yang menangani RUU ini, meminta agar: (1) ada jaminan bahwa RUU Pendidikan Tinggi tidak akan dilakukan pembatalan dan dapat diselesaikan pada 1 kali masa sidang, yaitu Masa Sidang IV tahun sidang 2011-2012; (2) dalam hal adanya penambahan substansi dari Pemerintah untuk menyempurnakan rumusan draf, tidak mengubah substansi RUU Pendidikan Tinggi hasil Panja 4 April 2012.

[2] RUU Pendidikan Kedokteran. Untuk RUU ini juga belum dapat diselesaikan pada pembicaraan tingkat I di komisi X, namun, di kalangan internal DPR masih diperlukan kata sepakat karena ada permintaan dari komisi IX untuk ikut dilibatkan dalam pembahasan. Untuk hal ini, Pimpinan Dewan perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu, baik dengan Komisi IX dan X, maupun dengan pimpinan fraksi yang di agendakan pada Masa Sidang IV.

Dengan demikian, RUU Pendidikan Tinggi dan RUU Kedokteran merupakan 2 RUU yang menjadi prioritas harus selesai pada masa sidang ke IV yang akan datang.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



[3] RUU Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Satu pembentukan Propinsi Baru yaitu Kalimantan Utara, dan 18 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota telah disampaikan melalui surat Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta kesediaan Presiden menunjuk menteri yang akan membahas bersama DPR.

[4] Beberapa RUU yang telah menjadi RUU DPR telah disampaikan kepada Presiden untuk dimintakan penunjukan Menteri yang akan membahasnya bersama DPR yaitu RUU Perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; RUU Tentang Mahkamah Agung; RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan; RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Beberapa RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan telah diperpanjang masa tugasnya oleh Rapat Paripurna, diharapkan akan dituntaskan pembahasannya pada Masa Sidang IV dan Masa Sidang I 2012-2013.

RUU Migrant Workers

RUU yang telah disahkan oleh DPR untuk menjadi UU dalam masa sidang yang lalu yaitu: Pengesahan Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). RUU ini perlu segera menjadi UU, karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan Migrants Workers, atau para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI). Peristiwa penembakan TKI oleh polisi Malaysia baru-baru ini sangat menyakitkan hati masyarakat Indonesia, tidak hanya keluarganya tetapi seluruh rakyat Indo-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



nesia. Dewan meminta agar kejadian ini diinvestigasi secara tuntas oleh Pemerintah/pejabat yang berwenang dengan Pemerintah Malaysia. RUU ini mengacu pada konvensi yang telah ditanda-tangani Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan keluarganya yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan mereka. Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi ini dalam rangka mendorong diterapkannya prinsip-prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global. Pekerja migran berhak untuk menikmati hak asasi manusia.

Dalam salah satu pasal didalam konvensi ini, khususnya pasal 10, mengatakan bahwa tidak seorang pun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi yang merendahkan martabat perkerja migran. Ketentuan ini menjadi cacatan penting yang akan menjadi acuan dalam menangani kasus penembakan 3 TKI tersebut.

Pada pasal 16, juga dicantumkan bahwa para perkerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif oleh negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan aparat publik atau orang perseorangan kelompok atau lembaga. Bahkan diatur bahwa, para pekerja migran dan anggota keluarnya yang ditangkap, harus diberi tahu pada saat penangkapan dalam bahasa yang mereka dapat memahami tuduhan yang dikenakan kepadanya.

pada pasal 23, diatur para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memperoleh pilihan meminta perlindungan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara tersebut apabila hak yang diakui dalam konvensi ini dilanggar. Dengan persetujuan DPR atas RUU ini untuk diundangkan, maka Pemerintah memiliki dasar kuat dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran, dan langkah-langkah bagi penanganan kasus TKI di Malaysia.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.27 Tahun 2009 tentang MD3, dan Peraturan Tata Tertib DPR RI, siklus anggaran RUU APBN TA 2013 akan dimulai. Tahap awal siklus dimulai dengan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 antara Pemerintah bersama Dewan, yaitu tanggal 20 Mei 2012, Pemerintah akan menyampaikan Pokok-pokok Pembicaraan, meliputi: [1] Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2013, [2] Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L 2013, [3] Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan 2013, dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 ini berbeda de-

ngan tahun sebelumnya, karena Pemerintah telah mengajukan dan membahas RUU APBN-P 2012, dan telah disahkan DPR pada tanggal 30-31 Maret 2012 yang lalu. Tentu Pokok-Pokok Pembicaraan RAPBN 2013 merupakan kesinambungan dari UU APBN-P 2012.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan fungsi ini dilakukan melalui Kunjungan Kerja Komisi-Komisi ke Daerah dan kunjungan anggota DPR ke domisilinya masing-masing. Hampir semua provinsi telah dikunjungi oleh Komisi-Komisi DPR. Hasil kunker akan ditindaklanjuti untuk dilaporkan dan dibahas dalam rapat-rapat Komisi pada Masa Sidang IV yang akan dibuka pada 14 Mei 2012. Beberapa Komisi telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi I, maupun oleh Komisi lain, dalam rangka persiapan pembahasan RUU.

Penetapan Pejabat Publik

Pada Masa Sidang IV, akan ada pembahasan melalui fit and proper test oleh Komisi terkait untuk: [1] ketua dan anggota Dewan Komisioner OJK, [2] melengkapi anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), [3] pemberian pertimbangan duta besar negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia.

[1] Keanggotaan Dewan Komisioner OJK, Komisi XI yang akan menangannya lebih dahulu akan melakukan rapat internal setelah sidang dibuka 14 Mei 2012 dengan agenda membahas dan menyusun mekanisme pemilihan anggota Dewan Komisioner OJK. Ada 14 nama yang telah diusulkan pemerintah ke DPR, 14 nama tersebut adalah: Muliawan D. Hadad, Achjar Iljas, Mulia P. Nasution, I Wayan Agus Martayasa, Nelson Tampubolon, Riswinandi, Nurhaida, Rahmat Waluyanto, Isa Rachmatarwala, Firdaus Djaelani, Ilya Avianti, Rijani Tirtoso, Kusumanigtuti S. Soetiono, dan Yunus Husein. Komisi XI merencanakan lebih dahulu akan memanggil Panitia Seleksi sebelum melakukan fit and proper test terhadap para calon, dalam rangka menanyakan apakah mekanisme pemilihan sudah sesuai dengan UU. Diharapkan, dalam Masa Sidang IV, DPR sudah dapat memutuskan mengenai calon-calon Dewan Komisioner, agar langkah-langkah (pentahapannya) tidak melanggar ketentuan UU.

[2] Penetapan calon anggota KPHI, DPR pada Masa Sidang yang lalu telah melakukan fit and proper test terhadap 9 calon yang diajukan oleh Presiden ke DPR, meliputi unsur-unsur dari Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, Ormas IPHI, tokoh masyarakat, dan MUI. Dari 9 nama yang diajukan, DPR telah menyetujui 4 nama, dan telah disampaikan kepada Presiden untuk menjadi calon anggota KPHI periode 2012-2015. Nama-nama calon yang telah disetujui adalah: Dr. H.A. Chalik Masulili, M.Sc., Drs. H. Slamet Efendi Yusuf M.Si., Drs. H. Imam Addaruquthni, SQ, MA., Drs. H. Muhammad Samidin Nashir, MM. Adapun 5 nama yang tidak mendapatkan pertimbangan dari DPR, diminta Presiden untuk mengajukan kembali sebagai penggantinya.*

Hasil Temuan Kunker Komisi II :

E-KTP Kalsel Lamban

Dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan 16-18 yang lalu, Komisi II DPR RI masih menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan e-KTP, sehingga target pencapaian 100% yang dicanangkan bulan April ini tak tercapai.

Ketua rombongan tim Kunker Komisi II ke Kalsel yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, menegaskan tak ada kewajiban warga membayar dalam pembuatan e-KTP karena sudah ditanggung pemerintah pusat agar pemerintah daerah tidak terbebani. Karena itu, warga masyarakat jangan sampai dibebani atau dipungut untuk pembuatan e-KTP.

Selain itu, menurut Taufik, program e-KTP sejak awal sudah ada perencanaan yang matang sehingga seharusnya tidak ada alasan keterlambatan kedatangan peralatan cetak dan sebagainya. "E-KTP ini proyek pemerintah pusat dalam menyajikan data kependudukan yang sudah dipersiapkan dengan matang sehingga jangan

lagi ada pungutan untuk masyarakat, dengan dalih di luar pembatasan waktu," ungkap Taufik saat berdialog dengan Camat Banjarmasin Tengah.

Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, mengatakan, sejak diluncurkan tahun 2011 lalu, di Kalsel baru melaksanakan di empat kabupaten/kota, sedangkan sembilan daerah lainnya baru dimulai tahun 2012. Diungkapkan, progress e-KTP hingga April 2012 Kota Banjarmasin mencapai 83 persen dari database penduduk yang waji memiliki KTP, sementara Kota Banjarbaru sekitar 82,82 persen, Kabupaten Banjar mencapai 70,6 persen dan yang terkecil realisasi e-KTP adalah Kabupaten Kotabaru baru sekitar 63,21 persen.

Rudy menjelaskan, kendala yang

dihadapi di lapangan antara lain distribusi peralatan terlambat diterima daerah sehingga juga mengalami keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat e-KTP. Selain itu, bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan sebelum peralatan diterima, membuat para operator mengalami kesulitan ketika mengoperasikan peralatan itu. Di samping itu, menurunnya animo masyarakat untuk membuat e-KTP, disebabkan panjangnya antrian masyarakat untuk ingin mendapatkan pelayanan KTP elektronik itu.

Untuk mengetahui kondisi lapangan, rombongan anggota dewan melakukan peninjauan lapangan antara lain ke kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan berbincang dengan Camat setempat dan warga yang sedang mengurus e-KTP.

Selain Taufik Effendi sebagai Ketua rombongan, Kunjungan Kerja Komisi II ke Kalsel ini diikuti Abdul Gaffar Patape, Abdul Wahab Dalimunthe, Nanang Samodra, Darizal Basir dan Iqnatus Mulyono dari Partai Demokrat, Eko Sarjono Putro dan Bambang Sutrisno dari Partai Golkar, Yasonna H. Laoly dari PDIP, Yan Herizal dari PKS, Fauzan Syai'e dari PAN, Akhmad Mukowam dari PPP dan Rindoko D. Wingit dari Partai Gerindra.

Dalam Kunker kali ini, selain Gubernur Kalsel, rombongan juga bertemu dengan Bupati Banjar untuk mengetahui gambaran umum perkembangan di daerah setempat, khususnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan e-KTP, Kepegawaian, Kearsipan, pelayanan publik dan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri).

Rombongan juga melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah, dan mengunjungi penerima PNPM



Tim Kunker Komisi II DPR RI saat meninjau pelaksanaan E-KTP di Kalsel

Mandiri di Desa Sasirangan, Kec. Kerak Hanyar di Kab Banjar. Rombongan juga mengunjungi Kanwil Badan Pertahanan Nasional Prov. Kalsel dan meninjau Depo Kantor Arsip Provinsi Kalsel.

E-KTP Cegah Kasus KTP Ganda

Sementara pada kesempatan berbeda, Ketua komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, program e-KTP ini adalah program nasional yang sangat penting sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus KTP Ganda. “Kita berharap dengan e-KTP banyak persoalan bangsa bisa kita atasi. Kami datang untuk mengecek apakah target waktu bisa dipenuhi atau tidak,” ucap Agun.

Agun berharap pada 1 Januari 2013 yang akan datang, semua warga negara di seluruh Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah memiliki e-KTP. “Jadi tidak ada lagi orang yang memiliki KTP ganda,” tegasnya. Lebih lanjut Agun menjelaskan, manfaat e-KTP sangat banyak, di antaranya hak-hak pribadi orang akan terlindungi, seperti kepemilikan harta, usaha, pajak, dan yang terpenting adalah untuk menata pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

“Data kependudukan sekarang kan tidak pernah jelas, oleh karena itu program e-KTP ini harus sukses. Angka kemiskinan saja selalu tidak jelas, demikian juga data mengenai kepemilikan selalu menjadi sumber masalah,” tambah Agun.

Tim Komisi II DPR saat meninjau pelaksanaan e-KTP di kantor Kec. Tikala, Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan menjelaskan, pelaksanaan pendataan e-KTP di Kota Manado telah mencapai 90%. Harley mengharapkan pada pertengahan tahun ini sudah bisa 100%.

Sementara saat mengunjungi Kab. Minahasa Selatan, kepada tim Komisi II, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, menginformasikan bahwa di Kab. Minahasa Selatan pendataan e-KTP sudah mencapai 90%. “Puji Tuhan saat ini untuk Program e-KTP di kabupaten Minsel sudah 90 persen sedangkan untuk PNPB berjalan dengan semestinya,” ungkap Paruntu.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR

RI yang dipimpin Ketua Komisi, Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG) didampingi Wakil Ketua Komisi Hakam Naja (F-PAN) melakukan peninjauan pelaksanaan e-KTP dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kota Manado dan Kab. Minahasa Selatan.

Sumsel Provinsi Pertama Rampungkan E-KTP

Komisi II DPR RI mengapresiasi positif Provinsi Sumatera Selatan yang telah merampungkan pelaksanaan perekaman e-KTP 100% di seluruh Kab/Kota. Hal tersebut mengemuka dalam acara penyerahan penghargaan pemerintah pusat yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang berlangsung di Gedung Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan (16/4).

Hadir pada acara tersebut rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan), Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan 15 Bupati/Walikota didampingi Ketua DPRD dan Kadisdukcapil se-Sumsel. Penyerahan penghargaan juga disaksikan 300 orang Camat se-Sumatera Selatan.

Ketua Tim Kunker Komisi II, Ganjar Pranowo mengatakan program e-KTP adalah program nasional yang sangat strategis yang menelan anggaran sangat besar. Mengingat pentingnya program ini, DPR telah menyetujui anggaran sebesar 5,6 triliun Rupiah. “Jika e-KTP ini tidak berhasil maka pemerintah dan DPR menanggung dosanya, karena anggarannya sangat besar,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Ganjar menambahkan, bahkan Mendagri sampai-sampai mempertaruhkan jabatannya jika program e-KTP ini tidak selesai sampai akhir tahun 2012 ini. Terkait pencapaian e-KTP di Sumsel yang mencapai 100%, Ganjar agak meragukan apakah benar-benar 100% penduduk sudah terdata. “Mestinya jangan pakai angka 100% lah, misalnya 99,9% mungkin lebih tepat, karena pasti ada satu-dua yang belum terdata,” ucapnya.

Ganjar memaparkan dalam reses kali ini Komisi II juga ingin meminta masukan mengenai beberapa RUU yang sedang dibahas DPR, di antaranya

RUU perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU Pilkada, serta RUU Desa.

Dalam sambutannya, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Pemprov, Pemkab/Pemkot serta seluruh Camat dan Lurah di Provinsi Sumatera Selatan, atas keberhasilan merampungkan pendataan e-KTP ini. “Semua ini tak lepas dari peran serta seluruh aparat Kecamatan dan Kelurahan, RT/RW dan semua masyarakat Sumsel yang dengan tulus dan ikhlas melaksanakan tugas dan kewajibannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan, dengan KTP lama, memang banyak celah untuk disalahgunakan, seperti pengiriman TKI yang merubah identitas TKI serta untuk kejahatan lain seperti teroris, sementara manfaat e-KTP sangat besar bagi tertib administrasi kependudukan, dan pelayanan pertanahan, perbankan, pelayanan paspor, Pilkada serta untuk kebutuhan administrasi lainnya. “KTP Elektronik lebih akurat serta lebih baik dibanding data yang lain, sehingga dukungan seluruh masyarakat sangat besar, dan kita yakin pada akhir Oktober 2012 seluruh wajib KTP, yaitu 172 juta jiwa sudah menyelesaikan pelaksanaan program e-KTP,” tegas Gamawan.

Sementara Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin menjelaskan, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 4 Kota, dengan penduduk sejumlah 8.522.528 jiwa serta wajib KTP 4.586.259 jiwa, dengan kerja keras para Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Kades se-Sumatera Selatan telah melaksanakan amanat UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Proses perekaman e-KTP di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai pada awal Oktober 2011. “Dengan kemauan keras, maka hambatan yang ada, menjadi masalah, oleh saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh Walikota/Bupati, Dinas Dukcapil, Camat, Lurah dan Kades yang telah bekerja keras dalam melaksanakan program strategis nasional ini. Sehingga seluruh perekaman dapat selesai tepat waktu, sebelum batas akhir 30 April 2012,” ungkapnya. (TV Parle)foto:parle

Organisasi Santri Harus Jauhi Budaya Minta-minta Bantuan

Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan Jaringan Santri Indonesia (JSI) sebagai salah satu organisasi alumni pondok pesantren dari seluruh Indonesia tidak terjebak budaya minta bantuan apalagi minta-minta proyek kepada aparat pemda.

Seharusnya, setiap alumni ponpes harus yakin dirinya dapat berperan menjadi pionir dalam membangun kemandirian dan kebangkitan ekonomi umat.

“Salah satu masalah umat saat ini adalah kemiskinan, kita mendorong kerjasama para alumni pesantren untuk berperan dalam kebangkitan umat. Potensi dan jumlah santri di seluruh Indonesia luar biasa apalagi kalau bisa berkumpul dan bersatu dalam organisasi Jaringan Santri Indonesia,” kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie saat menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus JSI Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (14/4).

Sebagai Presiden Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC), dia juga menambahkan akan terus mengkampanyekan upaya membangkitkan ekonomi umat

dengan berbagai cara. Membiarkan umat dalam kemiskinan akan membuat mereka terjebak pada kekufuran. “Nabi Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang sederhana namun jangan dilupakan ia adalah seorang pengusaha berhasil yang mapan secara ekonomi sehingga mampu menolong orang lain,”terangnya.

dia juga menceritakan pertemuannya dengan Ustadz Arifin Ilham yang ternyata juga seorang pengusaha sukses yang memulai upaya penguatan ekonominya dari bawah dengan berdagang mie instant.

Politisi Partai Demokrat ini meyakini JSI Riau dapat berperan banyak dengan membangun kerjasama dengan Pemprov setempat. “Asal jangan terjebak minta-minta apalagi minta proyek. Saya sejak awal menjadi Sekjen partai

sampai sekarang tidak pernah minta proyek sama bupati walikota. Saya hindarkan hal-hal seperti itu yakinlah rezeki Allah itu luas sekali,”katanya.

Kepada Wakil Gubernur Riau yang hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR mengatakan kalau pemprov berniat membantu tidak boleh ditolak namun dengan syarat harus dikelola secara profesional dengan catatan yang dilaporkan berkala. Marzuki yang juga Ketua Dewan Pembina JSI meminta agar organisasi ini turut mengkampanyekan kebiasaan bersedekah dikalangan umat. Ia meyakini budaya sedekah akan mendatangkan banyak kemudahan.

“Dengan bersedekah Allah menjanjikan balasan kebaikan sampai 700 kali lipat, itu yang luput kita pahami dengan baik. Banyak bersedekah insya Allah tidak akan hidup susah. Saya pribadi dari dulu diajarkan orang tua untuk rajin bersedekah mungkin itu sebabnya saya yang tidak pintar-pintar amat, tidak pernah menjadi anggota DPR tahu-tahu menjadi Ketua DPR,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Umum JSI Syofwatillah Mohzaib melaporkan ormas yang berdiri sejak tahun 2002 tahun lalu telah terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Keberadaan organisasi ini terus meluas di seluruh provinsi di tanah air dan mengusung beberapa program pemberdayaan seperti koperasi dan baitul mall wat tamwil.

“Kita itu di pesantren bukan hanya sepiring berdua tapi berlima, dalam temu alumni muncul kesadaran untuk kembali menguatkan persatuan. Kita tidak ingin ilmu kita mati setelah keluar pesantren, lewat JSI kita sepakat untuk kembali menggali dan melakukan sesuatu dengan ilmu tersebut,” paparnya. Syofwatillah yang juga anggota Komisi VIII DPR RI pada kesempatan itu secara resmi melantik jajaran pengurus JSI se-Propinsi Riau. (iky)



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus JSI Riau

DPR Nilai Produksi Migas Dan Tambang Tidak Optimal

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Milton Pakpahan mengatakan, sektor energi di Indonesia masih menghadapi tantangan utama yaitu peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh peningkatan pasokan dan ketersediaan.

“Peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara belum dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujarnya.

Saat ini Komisi VII sedang melaksanakan proses perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kata Milton seraya menambahkan perubahan dimaksud untuk memperbaiki tatakelola minyak dan gas bumi kita. “Hal tersebut sangat berkaitan erat dan perlu mendapatkan perhatian, mengingat Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah penghasil migas yang cukup besar,” jelasnya.

Terkait dengan sektor ketenagalistrikan, Milton menjelaskan, kita masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik.

“Sampai saat ini hanya sebagian kecil masyarakat di Papua Barat yang dapat menikmati listrik, sedangkan sebagian besar yang lain masih dalam kondisi gelap gulita dan belum menikmati terangnya listrik,” jelasnya.

Menurutnya, yang utama yaitu bagaimana upaya untuk mempercepat pembangunan sektor ketenagalistrikan dan pengembangan energi di Provinsi Papua Barat, karena Provinsi Papua Barat memiliki sumber energi yang cukup besar dan memiliki banyak sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan. “Begitu juga dengan bidang lingkungan hidup serta riset dan teknologi (ristek) perlu mendapatkan perhatian yang serius, khususnya terkait dengan kerusakan dan upaya konservasi lingkungan hidup,” paparnya.

Dia menambahkan, perlindungan

dan pelestarian masyarakat dan tanah adat di bumi Papua Barat juga harus diprioritaskan sedangkan pengembangan riset dan teknologi dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki, serta peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian juga perlu terus kita kembangkan guna melakukan akselerasi pembangunan.

Milton berharap, kunjungan kerja ini dapat mencapai tujuan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan dukungan terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sementara Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi mengatakan, sumber daya alam yang ada di Papua Barat sangat berlimpah terutama minyak dan gas.

“Mau batubara ada, mau tambang emas ada, tidak ada yang tidak ada di Papua Barat ini, tapi kenapa tidak disumbangkan kepada masyarakat disini. Papua Barat ini terlalu jauh, regulasi juga terlalu macam-macam. Kita orang Papua Barat kalau sudah bodoh jangan dibodoh-bodohi lagi, itu prinsip saya,” tegasnya.

Terkait dengan masalah listrik, Abraham menjelaskan, sejak dirinya menjabat sebagai Bupati (1992) sampai hari ini tidak ada penerangan listrik di desa-desa maupun di gunung. “Tolonglah agar di malam hari desa-desa atau kampung maupun gunung kelihatan terang diberi listrik,” pinta



Milton Pakpahan saat pertemuan dengan Gubernur Papua Barat

Abraham.

Memang banyak masalah yang kita hadapi di Papua Barat ini, kata Abraham seraya menambahkan kita berusaha jangan sampai Papua Barat ini keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau Timor Timur sudah lepas dari NKRI tapi Papua Barat jangan sampai lepas, kita jaga sama-sama negeri ini. Jadi lebih cepat isu-isu politik yang menjelekan bangsa ini dibandingkan pembangunan itu sendiri,” tuturnya.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Papua Barat terdiri atas 11 orang anggota, rombongan tim dipimpin Milton Pakpahan (F-PD) dan sejumlah anggota lintas fraksi, Heriyanto dari F-PD; Azwir Dainy Tara, SW. Yudha dan Halim Kalla dari F-PG; Irvansyah dari F-PDI Perjuangan; Mardani Ali Sera dari F-PKS; Irna Narulita dari F-PPP; Nur Yasin dari F-PKB; Saifuddin Donodjoyo dari Fraksi Partai Gerindra; dan M. Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura.(iw)/foto:iw/parle.

Kalimantan Barat Perlu Lapas Khusus Narkoba

Wilayah hukum provinsi Kalimantan Barat sudah seharusnya memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus kasus narkoba, mengingat semakin banyaknya narapidana kasus narkoba sementara lapas yang ada sudah penuh (over capacity).



Ketua Tim Kunker Komisi III DPR ke Provinsi Kalbar Tjatur Sapto Edy (kanan)

Hal itu dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPRRI ke provinsi Kalimantan Barat, Tjatur Sapto Edy (F-PAN) kepada wartawan usai melakukan peninjauan di Lapas kelas IIA Pontianak, yang terletak di wilayah Kab. Kubu Raya (19/4). “Semestinya ada pengembangan LP khusus narkoba agar penanganannya lebih intensif dan fokus,” ucapnya.

Dia mengatakan, persoalan narkoba terus meningkat hampir di semua LP di Indonesia karena itu perlu diting-

katkan upaya pemberantasan narkoba oleh jajaran BNN dan Kemenkumham.

Saat ditanya wartawan mengenai kondisi lapas, Ketua Tim mengatakan, sebenarnya lapas ini sudah overcapacity namun masih dalam batas toleransi. “Makanannya cukup dan pelayanan bagi pengunjung juga baik,” ungkapnya. Lebih lanjut Wakil Kept Komisi III DPR ini mengungkapkan, di wilayah hukum Kalimantan Barat kasus yang paling besar adalah narkoba dan trafficking.

Pada peninjauan tersebut ketua dan anggota tim sempat berbincang dengan para napi dan mendengar pengaduan dan keluhan mereka. “Paranapi narkoba mengungkapkan bahwa mereka adalah korban tapi dihukum sangat lama ada yang 10 tahun bahkan 12 tahun, tetapi para bandar besar malah bebas berkeliaran,” katanya.

Para napi tipikor juga melaporkan mereka belum mendapatkan salinan putusan tapi sudah dieksekusi. Hanya dari petikan putusan saja eksekusi bisa dilakukan, jadi ada prosedur hukum yang tidak sesuai KUHP. “Semua ini akan menjadi masukan bagi Komisi III saat rapat dengan Kejaksaan, Kemenkumham, dan MA bagaimana memperbaiki sistem hukum kita ke depan,” ujarnya. “Komisi III juga akan merevisi UU Kejaksaan Agung, UU MA, UU KUHP dan KUHP.”

Anggota Komisi III Nudirman Munir (F-PG) mengatakan, untuk mencegah peredaran narkoba di dalam LP, perlu dilakukan rotasi petugas LP atau sipir, agar tidak terbentuk jaringan-jaringan yang bisa dimanfaatkan oleh parabandar narkoba. “Selain melakukan rotasi petugas sipir, kamera pengawas atau CCTV juga perlu ditempatkan di sejumlah titik di dalam LP untuk mengawasi setiap gerak para napi dan petugas,” sarannya. “CCTV itu terbukti efektif dalam beberapa kasus dan harganya juga tidak mahal,” tambah anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Usai melakukan peninjauan ke Lapas Kelas IIA Pontianak, dilakukan pertemuan dengan Kakanwil Kemenkumham provinsi Kalimantan Barat dan dengan Kepala Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer di wilayah hukum Kalimantan Barat. (Rn. Tvp) foto:parle

Komisi X Dukung Dilaksanakannya Kongres Pendidikan Di Yogya

Komisi X DPR RI mendukung diselenggarakannya Kongres Pendidikan yang diprakarsai Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dukungan ini disampaikan saat Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DIY, Senin (23/4) yang dipimpin Ketua Komisi X H. Mahyuddin.

Namun Anggota Komisi X DPR Itet Tridjati Sumarijanto mengingatkan apakah sudah dilakukan penelitian terlebih dulu untuk mengetahui ciri-ciri dan keunggulan pendidikan di DIY. Penelitian ini perlu dilakukan agar bantuan anggaran yang diberikan Pusat tidak menyebar dan anggaran yang diberikan tepat sasaran.

Senada dengan itu, anggota Komisi X lainnya Parlindungan Hutabarat mengatakan, Kongres ini sangat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Yogyakarta. Sebagai kota pelajar dan kota Kebudayaan, dia berharap kongres ini akan menghasilkan terobosan-terobosan bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan di provinsi ini.

“Dari kongres ini diharapkan akan membawa pendidikan Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono mengatakan, Kongres Pendidikan akan diselenggarakan pada tanggal 7-8 Mei mendatang.

Kongres ini, kata Sultan, akan membicarakan ciri dan keunggulan pendidikan di Yogyakarta. Dalam hal ini, akan dilakukan inventarisir dan akan membuat blue print baik lembaga daerah maupun dari pihak-pihak terkait lainnya.

“Semua ini dilakukan karena kami concern terhadap pendidikan di Yogya khususnya dan nasional umumnya,” kata Sultan.

Sultan menambahkan, Pemerintah Daerah akan selalu berupaya untuk mempertahankan ikon Yogya sebagai kota pendidikan dan kebudayaan.



Tim Kunker Komisi X berfoto bersama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X

sultan mengatakan, kondisi dan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah dan Pemerintah Daerah 5 - 20 tahun ke depan untuk bidang pendidikan adalah kondisi dimana lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan lembaga penyelenggara. Pendidikan asing yang telah menjamur di negeri kita.

Dalam rangka pembangunan dan peningkatan IPM, Pemerintah Daerah telah dan akan melakukan program kegiatan yang menunjang rata-rata lama sekolah dan peningkatan angka melek huruf. IPM Provinsi DIY, kata Sultan, berada pada rangking 4 nasional dengan nilai 75,77.

Namun ada kendala yang dihadapi yakni tidak cocoknya data BPS dengan data dari Dinas Dikpora terkait jumlah

buta aksara di Provinsi DIY. Target yang harus dicapai tentu bagaimana memperkecil angka buta huruf yang menurut BPS masih cukup besar.

Pemerintah Daerah, kata Sultan, telah membuat Grand Design program dan project plan tahun anggaran 2010-2014 dengan lima agenda besar sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Lima agenda tersebut adalah mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua nondiskriminatif, mewujudkan pendidikan karakter berbasis budaya, mewujudkan pusat unggulan mutu pendidikan, mewujudkan perAn strategis pendidikan terhadap pembangunan dan mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. (tt)foto:parle

Komisi VI Dorong Ekstensifikasi Lahan PT. Garam

Komisi VI DPR RI mendorong rencana ekstensifikasi lahan yang akan dilakukan PT. Garam di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.



Komisi VI saat meninjau lahan PT. Garam

Hal tersebut mengemuka pada pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VI dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya beserta jajarannya, dan sejumlah direksi BUMN bidang pangan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/5).

Ketua Tim Komisi VI DPR RI Erlangga Hartarto (F-PG) mengatakan, kendala investasi di NTT adalah persoalan kepemilikan lahan yang masih sulit. "Tumpang tindih kepemilikan lahan membuat investor sulit masuk," ucap Erlangga. Di samping persoalan lahan, persoalan kesejahteraan juga penting mengingat NTT berbatasan dengan Negara tetangga Timor Leste.

Lebih lanjut Ketua Komisi VI DPR ini menjelaskan, disamping PT. Garam yang akan melakukan ekspansi, NTT juga akan menjadi sentra industri gula dengan masuknya PT. Wilmar yang akan membangun pabrik gula. "Ini akan mendukung swa sembada gula

tahun 2014," tambahnya.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya mengatakan, dengan luas wilayah lautan 200.000 km² dan garis pantai 5.700 km, serta iklim 8 bulan kemarau dan 4 bulan hujan, menjadikan NTT sangat potensial untuk pengembangan industri garam. "Terkait industri garam pemprov memang harus menghitung untung ruginya alir fungsi lahan antara untuk lahan pertanian atau untuk garam," katanya. Namun Gubernur menyakinkan pihaknya siap mendukung perluasan lahan garam yang akan dikembangkan PT. Garam (persero).

Direktur Keuangan PT. Garam (persero), Yuliang Lintang memaparkan, pihaknya telah melakukan penelitian bahwa lokasi terbaik untuk budidaya garam di provinsi NTT adalah di Kupang, Kupang Timur, dan Kupang Tengah. "Kami rencanakan 5.000 hektar, namun pada tahun 2012 ini yang sudah

siap 3.000 hektar," ungkapnya. Yuliang menambahkan, target produksi sebesar 350 ribu ton per tahun, atau 120 ton perhektar per tahun. "Biaya perluasan lahan di NTT ini membutuhkan anggaran 400 milyar rupiah," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Arya Bima (F-PDIP) mengatakan, pengembangan industri garam seluas 3.000 ha di NTT akan membutuhkan 15.000 tenaga kerja. "Dengan target 350 ribu ton per tahun, NTT bisa memberi kontribusi bagi produksi garam nasional, sementara konsumsi nasional 1,5 juta ton," jelas Arya Bima.

Anggota Komisi VI, Idris Laena (F-PG) mengatakan, adalah ironis, sebagai negara kelautan/bahari tetapi garam saja harus impor. "Kebutuhan garam untuk konsumsi dan industri sekitar 3 juta ton per tahun, sementara kita hanya mampu memproduksi 600.000 ton untuk garam konsumsi," ungkap anggota Badan Anggaran ini.

Idris menegaskan, DPR mendorong upaya ekstensifikasi lahan garam di NTT ini. "Kami dorong pemerintah untuk mewujudkan ini, jika perlu pemerintah menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. Garam pada tahun 2013 sebesar 400 milyar," ucap Idris Laena.

Di samping melakukan pertemuan Gubernur dan BUMN pangan, dalam kunjungan kerja di NTT kali ini, Komisi VI juga mengadakan pertemuan dengan direksi BUMN energi, BUMN transportasi, dan BUMN perbankan. Anggota Komisi VI yang turut serta : Idris Sugeng (F-PD), Ida Ria (F-PD), Jonny Buyung Saragih (F-PD), Adi Putra Darmawan (F-PG), Hayani Isman (F-PG), HM. Idris Laena (F-PG), Sukur Nababan (F-PDIP), H. Iskandar D. Syaichu (F-PPP), KH. Unais, Ali Hisyam (F-PKB), dan Lukman Hakim (F-Gerindra). (Joe.tvp)/ foto:parle

Komisi X DPR Serap Aspirasi Akademi UGM

Komisi X DPR RI serap aspirasi akademisi dari UGM dan berbagai universitas lainnya terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi (PT) dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

“Komisi X ingin meminta masukan terkait RUU PT dan RUU Pendidikan Kedokteran untuk lebih menyempurnakan ke dua RUU dimaksud,” kata Ketua Komisi X DPR H. Mahyuddin dalam serangkaian agenda kunjungan kerja, Selasa (24/4).

Ke dua Rancangan Undang-Undang tersebut sebenarnya dijadwalkan disahkan sebelum penutupan masa persidangan yang lalu, namun Pemerintah mengusulkan untuk menunda sementara pengesahan RUU tentang Pendidikan Tinggi (RUU PT) karena masih ada tiga peran dan fungsi perguruan tinggi yang belum dimasukkan dalam RUU Pendidikan Tinggi.

Peran-peran tersebut adalah peran perguruan tinggi dalam menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan. Perguruan Tinggi sebagai pilar bangsa dalam membangun dan mengawal transformasi demokrasi dan Perguruan Tinggi dalam menyiapkan konvergensi budaya dan peradaban dunia.

Ketiga hal itu, mendorong pemerintah untuk meminta kepada DPR (Komisi X) agar dapat memberikan perpanjangan waktu masa sidang dalam membahas RUU tersebut.

Untuk itu, kata Mahyuddin, dalam kesempatan kunjungan kerja kali ini, Komisi X DPR sekaligus ingin mendapatkan saran dan masukan terkait dengan ke dua RUU dimaksud.

Beberapa masukan UGM yang diharapkan, diantaranya terkait pasal 50 ayat (2) yang menyebut PT menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya, dan pasal 24 ayat (3) tentang perguruan tinggi yang dapat melibatkan partisipasi dari masyarakat, dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. “Juga tentang penyelenggaraan pendidikan nirlaba. Itulah hal-hal yang

perlu saya sampaikan dan penting,” katanya.

Sedangkan terkait rancangan Pendidikan kedokteran, maka penyelenggaraan pendidikan dokter menurut RUU pendidikan Kedokteran sudah tegas menyatakan harus berada di tingkat fakultas. “Sehingga, kelak tidak ada lagi membuka program studi kedokteran atau kedokteran gigi, semua harus fakultas.

Jika selama ini bisa mengampu kepada fakultas yang serumpun, nanti tidak ada lagi begitu langsung fakultas. Makanya universitas dapat membentuk tersebut dengan segala kelengkapannya,” tambah Mahyuddin.

RUU Pendidikan Kedokteran menyebut rumah sakit pendidikan harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebuah rumah sakit yang memenuhi standar dan disusun oleh kolegium bersama-sama KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Rumah sakit tersebut dinamakan rumah sakit utama.

Dalam memberikan masukannya

Rektor Universitas Gajah Mada, Sudjarwadi mengatakan, dalam RUU ini hendaknya tidak merubah hal-hal yang sudah baik sebaiknya diteruskan saja. RUU ini diharapkan jangan sampai ada pasal-pasal yang bertentangan dengan aturan-aturan di universitas.

Terkait dengan RUU Pendidikan Kedokteran, RUU ini diharapkan jangan sampai menutup hal-hal yang bersifat inovatif yang berkaitan dengan kedokteran.

Sudjarwadi mengatakan, intinya jajaran UGM mendukung sepenuhnya pengesahan RUU PT dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dengan payung legalitas yang kuat.

RUU ini juga diharapkan mempercepat tersedianya landasan hukum yang kuat sebagai acuan dalam penyelesaian masa transisi khusus bagi 7 (tujuh) Perguruan Tinggi BHMN yang sudah memiliki capaian yang membanggakan di kancah internasional. (tt) foto:parle



Para civitas Akademisi UGM

Poso Sangat Membutuhkan Dokter Spesialis

Ketua Tim komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mendesak Kementerian Kesehatan mengakomodasi kebutuhan wilayah Poso terkait tenaga medis, salah satunya dengan menetapkan Poso sebagai wilayah khusus, sehingga Kementerian Kesehatan dapat memberikan program – program yang diperlukan, walaupun program-program tersebut berbeda dengan daerah lain dengan asumsi Poso merupakan bekas daerah konflik.

Sementara, Bupati Poso Piet Inkiriwang, saat menerima rombongan tim komisi IX yang dipimpin oleh Irgan Chairul Mahfiz, yang diikuti oleh anggota-anggota komisi IX, Zurmiar Yanri, Anita Jacoba Gah, Verna Gledies Merry Inkiriwang, Endang Agustina Syarwan Hamid, Mariani Akib Baramuli, Aditya Anugrah Moha, Sri Rahayu, Herlini Amran, dan Mardiana Indraswati, mengatakan sampai saat ini Kabupaten Poso hanya memiliki 1 dokter spesialis mata, 1 orang spesialis kebidanan dan hanya 1 orang dokter spesialis bedah, ditambah lagi dokter-dokter tersebut tinggal di Makasar sehingga mereka hanya berada di Poso dari hari senin hingga jumat siang.

Menurut data Dinas Kesehatan penyakit terbanyak yang di derita oleh masyarakat di daerah Poso adalah Infeksi saluran pernapasan (ISPA), Grastitis, Hypertensi, Penyakit pada system otot, dan Penyakit jaringan penekat. Kendala yang paling mendasar adalah Pemerintah daerah Poso hanya mampu memberikan gaji dokter spesialis sebesar sepuluh juta rupiah, dibawah permintaan para dokter spesialis yang mengharapkan mendapatkan penghasilan dua puluh lima juta rupiah per bulan, mengingat mereka masih menganggap Poso sebagai daerah konflik.(rd/tvp) foto:parle



Irgan Chairul Mahfiz (kiri) saat diterima Bupi Poso

“ Kita harapkan Kementerian Kesehatan bukan hanya memberikan program dalam bentuk bangunan fisik rumah sakit saja, tetapi juga memprioritaskan program-program pengadaan alat kesehatan, tempat

tidur pasien, dan penyediaan dokter-dokter, serta puskesmas baik puskesmas keliling maupun POSKEDES mengingat dalam wilayah Poso terdapat banyak desa-desa tertinggal dan sulitnya sarana transportasi,”ujarnya.

DPR Siap Sambut Presiden Portugal

Duta Besar Portugal untuk Indonesia Carlos Forta menyampaikan bahwa Presiden Portugal akan mengunjungi Indonesia pada Mei mendatang.

Pendapat tersebut disampaikan saat menemui Sekjen DPR yang diwakili oleh Deputy Bidang Administrasi Slamet Sutarsono didampingi pejabat terkait lainnya.

“Rencana kedatangan Presiden Anibal Cavaco Silva ke DPR bagian dari lawatan kenegaraannya ke Indonesia,

dijadwalkan 23 Mei yang akan datang,” jelas dubes Carlos dalam pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

Ia menambahkan kunjungan Presiden Portugal merupakan yang pertama kali ke Indonesia. Langkah ini bagian dari upaya meningkatkan

hubungan kedua negara, baik dibidang politik maupun ekonomi. Oleh karena itu dipandang penting untuk secara khusus berbicara dengan anggota parlemen Indonesia yang merupakan representasi dari 230 juta lebih rakyat Indonesia.

Disamping menanyakan masalah

prosesi termasuk keamanan, Dubes Portugal juga menyampaikan permintaan presidennya untuk dapat berpidato dihadapan anggota DPR. Ia menyebut akan menjadi kehormatan apabila hal tersebut dapat diwujudkan.

Slamet Sutarsono menjelaskan dalam menyambut pejabat setingkat Kepala Negara, DPR sudah mempunyai aturan protokoler sendiri. Masalah keamanan merupakan tanggung jawab Paspampres yang bekerja sama dengan jajaran TNI, Polri dan Pamdal DPR.

“Kita siap menyambut, terkait permintaan Presiden Portugal untuk menyampaikan pidato dihadapan anggota parlemen akan kita sampaikan kepada Speaker atau Ketua DPR,” paparnya. Pertemuan diakhiri dengan kunjungan melihat beberapa fasilitas di Gedung DPR, seperti ruang sidang komisi dan ruang rapat paripurna. (iky)



Pertemuan koordinasi antara Setjen DPR-RI dan pihak Portugal mengenai Kunjungan Presiden Portugal ke Gedung DPR

Blok Sebuku Potensial Dikembangkan Sebagai Sentra Pupuk

Komisi VII DPR menilai blok Sebuku di wilayah Pulau Laria-Lariang berpotensi menjadi sentra pupuk di Sulbar bahkan di kawasan timur. Pasalnya memiliki cadangan gas yang memadai dengan didukung potensi gas yang ada di Block Sebuku di wilayah pulau Laria-Lariang,

Menurut Nazaruddin Kiemas, Sulbar sebagai provinsi harus memiliki industri, yang memiliki konsep berkeadilan. Selain itu, Sulbar juga merupakan koridor ekonomi, yang memiliki daerah pertanian dan perkebunan yang banyak terdapat wilayah Sulbar, sehingga sudah sepatutnya pabrik pupuk juga dibangun di provinsi ini. “Apabila hal ini terjadi maka pabrik ini akan menjadi pabrik pertama yang ada di Indonesia bagian timur,” tegas Nazaruddin saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII di Provinsi Sulbar, Selasa (17/4).

Wakil ketua Komisi VII Zainudin Amali menegaskan, akan berkoordinasi dengan komisi VI DPR yang membidangi industri dan BUMN, supaya bagian dari pupuk kaltim yang holding ada di Pusri dapat dilakukan di Sulbar. Sementara mengenai keterlambatan



Tatap muka Komisi VII DPR RO dengan jajaran Pemprov Sulbar

dapat diteloransi sampai dua tahun, namun efeknya masyarakat merasakan secara langsung apa yang terkandung di dalam perut bumi mereka.

Dia menambahkan konsep pembangunan yang ada harus melibatkan ma-

sarakat sekitar. “Kita harus merubah paradigma itu, apa yang utama yang kita makmurnya dimana tempat dimana tempat SDA itu ada. Itu merupakan kewajiban kami melihat secara obyektif,”ujarnya.(as)Foto: Agung Sulistiono.

Yogya Akan Bangun Perpustakaan Bertaraf Internasional

Komisi X DPR RI mendukung rencana Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun perpustakaan bertaraf internasional. Perpustakaan ini nantinya akan menjadi perpustakaan terbesar yang berada di Asia Tenggara.



Tim kunker Komisi X DPR RI saat meninjau perpustakaan di Yogyakarta

Rencana pembangunan perpustakaan ini disampaikan Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY Eddy Siswanto saat Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi ini, Rabu (25/4) yang dipimpin Ketua Komisi X DPR H. Mahyuddin.

Komisi X DPR menanyakan sejauhmana kesiapan pembangunan perpustakaan besar ini, mengingat jika dilihat dari profil gedung yang dipaparkan perpustakaan tersebut berdiri sangat megah.

Eddy Siswanto menjelaskan, perpustakaan yang akan dibangun ini nantinya akan menjadi Centre of Excellent untuk perpustakaan Jawa dan Madura.

Perpustakaan ini akan dimulai pembangunannya di tahun 2012, dengan luas lahan 135 meter x175 meter, tepatnya berlokasi di Jogja Expo Centre (JEC) di jalan Janti, Yogyakarta.

Gedung ini akan dibangun tiga lan-

tai dan dana yang dipersiapkan untuk pembangunan perpustakaan tersebut sebesar Rp 53 miliar.

Adapun tahapan-tahapan pembangunan perpustakaan ini adalah, tahun 2011 memasang pondasi setinggi enam meter, tahun 2012 pelaksanaan pembangunan dan 2013 pengisian gedungnya.

Menurut Eddy, dengan dana sebesar itu baru bisa diselesaikan gedungnya saja. Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan Komisi X DPR untuk pengisian gedung perpustakaan tersebut. "Diperkirakan dana untuk pengisian sebesar Rp 20 miliar," katanya.

Eddy mengatakan, pembangunan perpustakaan yang terbesar di Asia Tenggara ini merupakan wujud nyata dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan perpustakaan sebagai rumah ke dua bagi masyarakat Yogyakarta khususnya.

Saat ini, ada 4 (empat) perpustakaan yang dikelola Pemerintah Daerah, yakni

unit Badran I, unit Badran II, unit Malioboro dan unit Jogja Study Centre (JSC). Unit Badran I dengan fasilitas layanan sirkulasi, ruang baca, referensi, koleksi Universitas Terbuka, koleksi langka, layanan deposit, paket buku, koleksi digital, layanan jurnal elektronik dan layanan perpustakaan keliling.

Sedang unit Badran II dengan fasilitas layanan sirkulasi, ruang baca, majalah dan surat kabar, koleksi langka dan layanan referensi.

Untuk Unit Malioboro memberikan fasilitas layanan Yogyakartaiana, majalah dan surat kabar, Kyoto Corner, internet dan layanan audio visual. Dan unit Jogja Study Centre melayani fasilitas internet, layanan perpustakaan kanak-kanak dan layanan koleksi braille.

Eddy mengatakan, konsep dan kebijakan pembangunan perpustakaan daerah untuk tahun 2010-2014 utamanya untuk meningkatkan minat baca dan indeks pembangunan manusia di Provinsi DIY.

Pelaksanaannya, katanya, salah satunya membangun dan menyelenggarakan perpustakaan terpadu bertaraf internasional yang sudah dimulai sejak tahun 2011, akan diselesaikan tahun 2012 dan akan dioperasikan 2013.

Adapun kendala penyelenggaraan Perpustakaan yang ada saat ini secara umum belum dikelola oleh tenaga yang profesional dan kurang memiliki kompetensi pendidikan di bidang perpustakaan.

Perpustakaan, kata Eddy, masih dianggap bukan hal penting atau pokok sehingga tenaga perpustakaanpun sebagian adalah tenaga yang tidak produktif. Selain itu, pergantian pimpinan perpustakaan yang relatif singkat.

Sementara buku-buku yang diminati masyarakat secara berurutan adalah ilmu murni, ilmu-ilmu terapan, ilmu pengetahuan sosial, komputer dan agama. (tt) foto:parle

UNIPAT Layak Jadi Sentra Pendidikan Kawasan Timur

Komisi X DPR mendukung Universitas Patimura dijadikan sentral Pendidikan Tinggi di bagian Indonesia bagian Timur. Demikian yg dikatakan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Propinsi Maluku, Asman Abnusr, Senin (23/4) siang.

Ketua Tim H Asman Abnur mengatakan, setelah melihat dan meninjau langsung khususnya di Universitas Patimura tersebut, Tim akan membawa hasil kunjungan tersebut saat Raker Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pasalnya, banyak sekali kendala yang harus dikomunikasi pada tingkat pusat.

Dia berharap kedepan Universitas tersebut sudah ada perubahan dan perbaikan dibandingkan dengan kondisi sekarang yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. "Universitas ini semestinya sudah menjadikan pusat pendidikan tinggi di wilayah Indonesia bagian timur,"ujarnya.

Menurutnya, jika fasilitas dan prasarannya memadai, tentunya Universitas Patimura sudah menjadi pusat pendidikan tinggi di wilayah tersebut. "Kita harapkan nantinya para pelajar yang ada di wilayah timur tidak lagi mencari ilmu di jakarta maupun di Jawa,"ujar Asman.



Anggota Tim kunker Komisi X DPR RI

Dia menambahkan dirinya akan menampung semua aspirasi kalangan Unpat, kemudian akan diperjuangkan rekan-rekan anggota Komisi X dalam Raker dengan Menteri yang terkait.

Disamping itu, dalam waktu dekat

juga akan meminta Kemendikbud melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, dan mudah mudahan saja segera terlaksana.(spy)

Poempida Berjanji Perjuangkan Aspirasi Kalbar

Anggota DPR dari Partai Golkar Poempida Hidayatulloh berjanji akan berusaha maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalbar.

“Tentunya saya akan ditempatkan di Komisi I DPR menggantikan posisi Jeffrie Geovanie nantinya,”katanya kepada Parle usai dilantik sebagai anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan tahun 2009-2014 menggantikan Jeffrie Geovanie, selain itu Azhar Romli menggantikan Basuki Tjahaja Purnama, di Ruang Operation

Room, Kamis, (26/4).

Menurut Poempida, dirinya memiliki program pada bidang Komisi I DPR khususnya terkait isu Informasi dan Komunikasi yaitu keinginannya untuk memberantas software bajakan yang merajalela di Indonesia. "Tentunya untuk memberantas ini perlu kerjasama lintas sektoral seperti dengan Men-

kum HAM,"katanya.

Dia mengatakan, jika Indonesia ingin maju tentunya persoalan HAKI atau hak intelektual harus dikedepankan. "Kalau begini industri IT tidak akan maju-maju bila pembajakan marak sekali,"katanya.

Dia menambahkan, dirinya sangat yakin apabila software bajakan bisa



Pelantikan Anggota PAW yang baru Poempida Hidayatulloh (kanan)

diberantas tentunya harga software asli yang terbilang mahal tersebut akan turun drastis. “jika dijamin tidak dibajak tentu software yang asli turun,” tambahnya.

Menyinggung penembakan TKI di Malaysia oleh polisi diraja Malaysia, Poempida mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan informasi terkait persoalan tersebut. bahkan, tambahnya, dirinya akan segera mengontak partai oposisi di Malaysia terkait penembakan itu. “Saya cukup dekat dengan partai oposisi di Malaysia dan akan kumpulkan informasi terkait penembakan tersebut,”ujarnya. (si)

Anis Matta Merasa Terhormat Menjadi Saksi KPK

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengaku dirinya merasa terhormat dipanggil oleh KPK. karena seorang pimpinan harus menunjukkan kepada publik bahwa semua pejabat publik tidak boleh alergi ketika dipanggil KPK.

“Saya sempat menanyakan kepada penyidik KPK apa yang dituduhkan Wa Ode tersebut buktinya mana yang dirubah oleh saya, bahkan mereka penyidikpun tidak dapat memberikan buktinya,”ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, baru-baru ini.

Menurutnya, dirinya diberikan pertanyaan mengenai dokumen pendukung saja, Pasalnya korupsi Wa Ode terjadi pada rentang pembahasan anggaran. “saya ditanya tindak sampai satu jam dan tidak sampai 10 dokumen, bahkan banyak kepotong istirahat termasuk solat,”ujarnya.

Anis Matta mengatakan, dia telah menyampaikan ke penyidik dimana seharusnya menghadirkan Wa Ode dan menanyakan siapa saja yang menerima uangnya. “Tentu rekening Wa Ode akan diperiksa untuk mengurai persoalan itu,”katanya.

Perlu diketahui, ujar Anis, sifat organisasi DPR itu flat karena itu didalam pengambilan keputusan itu bersama-sama. “Keputusan yang esensial berada didalam AKD sementara, pimpinan itu bukan bos tetapi speaker,”katanya.

Dia menambahkan, persoalan ini

jangan sampai tidak produktif. dan terkesan memunculkan black campaign (kampanye terselubung) terhadap

dirinya. “Ini jangan sampai seperti pengalihan isu semata saja terhadap kasus yang besar,”ujarnya.(si)



Wakil Ketua DPR RI Anis Matta

Kisah 23 Butir Telur Dalam Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPR yang dinyatakan terbuka untuk umum hampir selalu menarik perhatian warga masyarakat. Mereka datang sebagai peninjau dan duduk di balkon yang disediakan khusus. Namun terkadang para peninjau ini datang membawa misi tersembunyi.



Kasubag Pamdal DPR RI

“Kita pernah menemukan 23 butir telur sebagian sudah busuk dalam kotak makanan di balkon para peninjau yang diduga akan dilemparkan ke arah anggota DPR yang sedang bersidang,” kata Arifin anggota Pamdal disela-sela latihan simulasi pengamanan sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/12).

Temuan 23 butir telur itu akhirnya membuat Pamdal menetapkan kebijakan para peninjau tidak diperkenankan membawa tas termasuk kotak makanan dan minuman pada saat mengikuti rapat paripurna. Semua barang dititipkan kepada petugas sebelum memasuki ruangan.

“Banyak peninjau yang tidak dapat menerima kebijakan ini, ada yang berdalih hak azasi mereka untuk makan. Apalagi anggota DPR di bawah boleh makan minum,” begitu alasan mereka seperti dijelaskan oleh Kabag Pengamanan Dalam Setjen DPR, Satyanto Nanang Priambodo.

Tata cara menjelaskan aturan dan langkah mengamankan para peninjau yang melanggar aturan menjadi



Anggota Pamdal DPR RI saat melakukan baris berbaris

bagian dari latihan simulasi Pamdal di ruang rapat paripurna. Setiap anggota Pamdal berlatih menegur dengan santun dan melakukan tindakan sesuai kesalahan secara terukur.

“Pada saat pengamanan rapat paripurna tentang rencana kenaikan BBM lalu, kita menegur mahasiswa yang hadir di balkon sampai 8 kali. Teguran tidak diindahkan kita bertindak, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh nen-

dang, tidak boleh mukul. Semua sesuai aturan termasuk apabila peninjau harus diturunkan dari balkon,” papar Nanang.

Setiap langkah pengamanan Pamdal menurutnya berdasarkan Tata Tertib yang kemudian diterjemahkan dalam Pedoman Umum yang ditetapkan Badan Urusan Rumah Tangga – BURT, dan telah disetujui oleh pimpinan DPR.

Bagi para peninjau sebelumnya mereka harus menandatangani perjanjian yang diantaranya berbunyi menjaga ketertiban selama sidang, tidak boleh membawa spanduk dan dilarang bersuara atau menyampaikan orasi. “Pamdal akan bertindak apabila

mereka melanggar aturan yang telah disepakati dan apabila ada perintah dari pimpinan rapat,” lanjutnya.

la menambahkan latihan simulasi mengamankan rapat paripurna dilakukan Pamdal secara berkala terutama pada saat masa reses anggota DPR. Masa sidang III DPR tahun sidang 2011-2012 ini, reses akan berakhir pada tanggal 13 Mei yang akan datang. (iky)foto: wy/parle

Anggota DPR Reses Pamdal Berlatih

Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) Setjen DPR RI dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan satuan, mengasah kepekaan dan kecepatan dalam bertugas.

Dalam masa reses pada saat anggota DPR lebih banyak berada di daerah pemilihan masing-masing, Pamdal memanfaatkan waktu dengan menggelar latihan dan simulasi pengamanan.

“Iya anggota DPR reses, menye-

rap aspirasi konstituen ke daerah pemilihan, kita disini sebagai supporting system tidak diam. Kita terus berlatih meningkatkan kemampuan,” kata Mardian Umar, Kepala Biro Umum Setjen DPR RI saat memantau jalannya simulasi pengamanan rapat paripurna

di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/12).

Dalam simulasi tersebut anggota Pamdal berlatih mengamankan rapat yang berlangsung ricuh. Anggota DPR dari beberapa fraksi yang tidak sepakat digambarkan memprotes keputusan pimpinan sidang, sebagian maju ke depan, naik ke mimbar merengsek ke meja pimpinan sidang. Kondisi ini bisa membuat persidangan menjadi tidak terkendali.

“Apabila situasi rapat tidak terkendali Pamdal dapat bergerak apabila ada perintah dari pimpinan rapat, kita berlatih mengamankan dengan tetap menjaga martabat anggota maupun pimpinan DPR yang terhormat,” papar Kepala Bagian Pengamanan Dalam, Setyanto Nanang Priambodo yang memimpin jalannya simulasi.

Setiap langkah pengamanan Pamdal yang saat ini berjumlah 489 orang menurutnya berdasarkan Tata Tertib yang kemudian diterjemahkan dalam Pedoman Umum yang ditetapkan Badan Urusan Rumah Tangga – BURT, dan telah disetujui oleh pimpinan DPR.

Jalannya simulasi terlihat tidak mudah terutama ketika petugas Pamdal harus masuk diantara rengsekan anggota dewan yang tidak puas kearah meja pimpinan. Mereka harus menjadikan tubuh mereka menjadi pagar antara anggota dan pimpinan rapat yang terlihat bertikai. “Tidak boleh mendorong, apalagi mengasari anggota dewan yang terhormat,” tegasnya.

Simulasi itu juga melatih Pamdal melaksanakan tugas mengamankan pimpinan DPR dan mengawalinya menuju ruangan yang lebih aman. “Tapi semuanya kita lakukan apabila ada perintah dari pimpinan rapat, ada perintah kita bergerak, tidak ada perintah kita tetap menunggu. itu prosedur yang harus kita patuhi,” demikian Nanang. (iky)foto:wy/parle



Anggota Pamdal DPR RI saat melakukan latihan dan simulasi pengamanan



DPR Ikut Berduka Atas Meninggalnya Menkes

DPR RI ikut berduka dan kehilangan atas meninggalnya Menteri Kesehatan nonaktif Endang Rahayu Sedyaningsih.



Almahurmah Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih saat menghadiri rapat di DPR RI



“DPR ikut berduka. Kita kehilangan salah satu puteri terbaik yang keahliannya relatif langka. Mudah-mudahan amanahnya diterima di sisi Allah dan negara mendapatkan pengganti yang lebih baik,” papar Wakil Ketua DPR RI Anis Matta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5)

Anis berharap pengganti Menkes nantinya ditunjuk pada waktu yang tepat, ia enggan mendorong SBY untuk menunjuk pengganti Menkes karena masih dalam posisi berduka.

Endang menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 11.41 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta setelah mengalami masa kritis sejak siang hari akibat penyakit kanker paru-paru sejak Oktober 2010.

Ia mengundurkan diri sebagai Menkes pada Kamis (26/4). Pengunduran dirinya diumumkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tugas-tugas Menteri Kesehatan dijalankan oleh Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Sementara Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Kesehatan juga ikut kehilangan sosok Menteri Kesehatan yang anggun dan penyabar.

“Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI saya berduka atas meninggalnya Menkes. Dia pribadi anggun yang hangat dan familiar serta penyabar. Seorang birokrat yang intelektual cerdas dan tahan terhadap segala kritikan, dia mampu hadapi dengan senyum dan mampu memberikan kesepahaman anggota DPR,” papar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz.

Menurutnya, Endang dikenal sebagai Menkes yang bertanggungjawab. Banyak program penting yang dilaksanakan dengan sukses. (sc)foto:sc



DPR RI

**MENGUCAPKAN
SELAMAT**

HARDIKNAS

2 MEI 2012

